



PENETAPAN
Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUH. SALHAM, bertempat tinggal dahulu di Lingk. Alasaulo, Desa Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo sekarang domisili di BTN Graha Prima Coppo Blok D Nomor 9 Lingk. Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Anabanua 5 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), email: muhammadsalhambarru@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 731309507770001 tanggal 01 Januari 2012, tertera identitas pemohon yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311033005230006 tanggal 31 Mei 2023, tertera identitas pemohon yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor 06 OA oa 0064925 tanggal 10 Juni 1991,tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon nomor 06 OA ob 1587782 tanggal 6 Juni 1994,tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon nomor 06 OB of 103261462 tanggal 31 Mei 1997,tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa didalam Ijazah Sarjana (S1) Pemohon nomor 82792-j.04-f/4404-811-2003 tanggal 15 Oktober 2003,tertera identitas pemohon yaitu MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga Pemohon yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 sedangkan pada Ijazah-ijazah pemohon tertera MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa atas perbedaan nama pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan pada data kependudukannya yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 dirubah menjadi MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 5 Juli 1977;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan atas namanya sebagaimana tertera pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/399/Dukcapil tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Nama pada data kependudukan pemohon ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan perubahan nama tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 731309507770001 tanggal 01 Januari 2012 dan Kartu Keluarga orangtua pemohon Nomor : 7311033005230006 tanggal 31 Mei 2023 **dirubah** menjadi MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 sebagaimana tertera pada Ijazah -ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan nama pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan yakni pada petitum butir ke- 2 yaitu menghapus frasa “dan Kartu Keluarga orangtua pemohon Nomor : 7311033005230006 tanggal 31 Mei 2023 “ untuk selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Salham Nomor 7313090507770001 tanggal 1 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OA oa 0064925 tanggal 10 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OA ob 1587782 tanggal 6 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OB of 103261462 tanggal 31 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Sastra atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 82792-J.04-T/4404-811-2003 tanggal 15 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 400.12/408/KEL.COPPO tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/399/DUKCAPIL tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. NURJANNAH, S.Kep binti H. MUH. IDRIS, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Ipar dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pemohon yang terdapat pada KTP Pemohon;
 - Bahwa nama yang tercantum pada KTP Pemohon yaitu Muh. Salham;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengubah menjadi Muhammad Salham Basir sebagaimana yang tertera dalam ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terjadi keseragaman data pada surat- surat Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

2. NURLAILAH IDRIS, A.MK binti H. MUH. IDRIS, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Istri dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pemohon yang terdapat pada KTP Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum pada KTP Pemohon yaitu Muh. Salham;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi Muhammad Salham Basir sebagaimana yang tertera dalam ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam ijazah- ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terjadi keseragaman data pada surat- surat Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu NURJANNAH, S.Kep binti H. MUH. IDRIS dan NURLAILAH IDRIS, A.MK binti H. MUH. IDRIS, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula Muh. Salham menjadi Muhammad Salham Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 400.12/408/KEL.COPPO tanggal 11 Oktober 2023, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Salham Nomor 7313090507770001 tanggal 1 Desember 2012 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 400.12/408/KEL.COPPO tanggal 11 Oktober 2023, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Salham Nomor 7313090507770001 tanggal 1 Desember 2012, maka telah nyata nama Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Muh. Salham;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OA oa 0064925 tanggal 10 Juni 1991, bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OA ob 1587782 tanggal 6 Juni 1994, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 06 OB of 103261462 tanggal 31 Mei 1997 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sarjana Sastra atas nama Muhammad Salham Basir Nomor 82792-J.04-T/4404-811-2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yakni semula Muh. Salham menjadi Muhammad Salham Basir;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/399/DUKCAPIL tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama Pemohon semula Muh. Salham menjadi Muhammad Salham Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURJANNAH, S.Kep binti H. MUH. IDRIS dan NURLAILAH IDRIS, A.MK binti H. MUH. IDRIS, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman data pada surat- surat Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula Muh. Salham menjadi Muhammad Salham Basir adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon pada KTP Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon semula yaitu MUH. SALHAM yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 731309507770001 tanggal 01 Januari 2012 **dirubah** menjadi MUHAMMAD SALHAM BASIR yang lahir di Anabanua pada tanggal 05 Juli 1977 sebagaimana tertera pada Ijazah -ijazah pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register data kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatikan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitum butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum- petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon semula yaitu MUH. SALHAM lahir di Anabanua tanggal 5 Juli 1977 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313090507770001 tanggal 1 Desember 2012, diperbaiki

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMMAD SALHAM BASIR lahir di Anabanua tanggal 5 Juli 1977;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar tanggal 16 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Surahmi Nihaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PN Bar